

PERSEPSI MASYARAKAT WILAYAH KUMUH TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI KOTA PALEMBANG 2024

Mohammad Yusril Syaifullah

NPP. 32.0223

Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: yusrilsyaifullah@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Rossy Lambelanova, AP, SIP, M.Si

ABSTRACT

Background: South Sumatra is the 9th province with the most slum areas, Palembang City which is the capital city is a contributor to the large area of slums. and it is indicated that this affects public perception in the implementation of general elections. **Purpose:** This study aims to explore the perceptions of people in slum areas regarding the implementation of general elections in Palembang City 2024. **Method:** Using a descriptive qualitative research approach, the theory used, namely political perception according to Musfi Yendra (2023) is used to analyze people's perspectives through interpretation, reaction, education and information related to political phenomena, namely general elections. Primary data were obtained through interviews with 12 informants, namely 3 slum communities and 2 community leaders in slum areas in Palembang City, Heads of Sub-districts (Camat) from 3 Sub-districts with the largest slum areas, Secretary of the Palembang City KPU, 2 Sub-district Election Committees and Functional Officials at the Palembang City Housing, Settlement and Land Office. **Results/Findings:** The results of the study indicate that public perception is more directed towards money politics because voting rights are used for election participants who mobilize the community through contributions in the form of money and improvements to facilities ahead of the election when campaigning. The factors causing this perception include economic factors, education, mobilization of group votes and limited access to information. Election organizers have played a role in improving public perception, but the results have not been optimal.

Keywords: Slum Areas, General Elections, Palembang City, Public Perception

ABSTRAK

Permasalahan: Sumatera Selatan menjadi provinsi ke-9 dengan wilayah kumuh terbanyak, Kota Palembang yang menjadi ibukota termasuk kontributor yang banyak luas wilayah kumuh. dan diindikasikan hal ini mempengaruhi persepsi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mendalami persepsi masyarakat yang berada di wilayah kumuh terhadap pelaksanaan pemilihan umum di Kota Palembang 2024. **Metode:** Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, teori yang dipakai yaitu persepsi politik menurut Musfi Yendra (2023) digunakan untuk menganalisis cara pandang masyarakat melalui interpretasi, reaksi, edukasi dan informasi terkait fenomena politik yaitu pemilihan umum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 12 informan yaitu 3 masyarakat di wilayah kumuh dan 2 tokoh masyarakat di wilayah kumuh di Kota Palembang, Kepala Wilayah Kecamatan (Camat) dari 3 Kecamatan dengan wilayah kumuh terluas, Sekretaris KPU Kota Palembang, 2 Panitia Pemilihan Kecamatan serta Pejabat Fungsional pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang. **Hasil/Temuan:** Hasil

penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat lebih mengarah kepada *money politic* karena hak pilih dipakai untuk peserta pemilu yang menggerakkan masyarakat melalui kontribusi berupa uang dan perbaikan fasilitas menjelang pemilu saat berkampanye. Faktor penyebab dari persepsi ini meliputi faktor ekonomi, pendidikan, mobilisasi suara kelompok dan keterbatasan akses informasi Penyelenggara pemilu sudah berperan dalam perbaikan persepsi masyarakat namun hasil yang ada belum optimal.

Kata Kunci : Wilayah Kumuh, Pemilihan Umum, Kota Palembang, Persepsi Masyarakat

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Selatan berada di posisi ke-9 sebagai daerah yang paling kumuh dan hasil data Kota Palembang memiliki pengaruh paling besar (Anon, 2016). Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 325/KPTS/DPRKP/2020 Tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Palembang menyatakan bahwa 1092,309 HA merupakan luas wilayah kumuh yang berada di Kota Palembang terlihat paling besar di sekitaran pesisir Sungai Musi, yaitu Kecamatan Kertapati, Seberang Ulu 2 dan Gandus. Kawasan kumuh merupakan salah satu masalah krusial yang ada di Indonesia termasuk Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Kajumulo Tibaijuka (2003) kawasan kumuh adalah suatu wilayah yang kondisi bangunan rumah atau hunian masyarakatnya mempunyai standar dibawah rata-rata dan bisa dikatakan buruk. Parameter wilayah kumuh diukur menggunakan indikator yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.14/PRT/M/2018 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan dan pemukiman kumuh. Pada kawasan kumuh ini ditemukan berbagai permasalahan, seperti penurunan kualitas lingkungan masyarakat yang secara tidak langsung akan berdampak pada persepsi politik.

Persepsi berasal dari kata bahasa Inggris, yang berarti "tanggapan". Sehingga, konteks politik persepsi berarti cara pandang, anggapan, pendapat dan kesimpulan sementara dari masyarakat terhadap dinamika politik. Persepsi politik mendatangkan reaksi atau interpretasi untuk seorang atau kelompok masyarakat tertentu, hal ini berdampak pada hasil proses politik. Persepsi politik juga erat kaitannya dengan edukasi dan informasi tentang politik (Yendra, 2023).

Pemilu bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, menegakkan pemerintahan yang sah, dan menjadi wadah penyampaian aspirasi dan kepentingan rakyat. Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, namun pelaksanaannya mengikuti ketentuan konstitusi (Hasan Aulia Hudhaibi, 2023). Sesuai dengan perintah yang tertera pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 untuk realisasi penyelenggaraan kedaulatan rakyat dilaksanakanlah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah mulai dari presiden, gubernur, walikota/bupati serta wakilnya dan untuk memilih anggota dewan. Fakta yang terjadi ditemukan bahwa pelaksanaan pemilu banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya bahkan kejadian ini cenderung meningkat setiap pelaksanaan pemilu. Fenomena ini dikenal sebagai golongan putih atau golput, fenomena sosial ini memberikan kesan pada khalayak bahwa putih adalah bersih dibandingkan dengan hitam atau kotor (Rancangan Undang-Undang, 2016). Peristiwa ini juga dimaknai sebagai tindakan apatisisme karena kejenjutan masyarakat terhadap tema pemilihan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada pemilu DPR 2019 menyatakan bahwa Sumatera Selatan menempati peringkat ke-25 dengan jumlah golput 16,05% dan Kota Palembang menjadi salah satu penyumbang golput dengan presentase mencapai 19,3%. Berdasarkan data golput KPU Kota Palembang dan luas wilayah kumuh dari Surat Keputusan Kota Palembang, kedua hal ini memiliki korelasi, seperti Kecamatan Gandus dengan luas wilayah kumuh 111.808 HA pada tahun

2019 persentase golput mencapai 14,8% dan tahun 2024 persentase golput 2,23%. Kecamatan Kertapati dengan luas wilayah kumuh 418.539 HA pada tahun 2019 persentase golput 0,61% dan tahun 2021 persentase golput tertinggi yaitu 3,35%, kemudian Kecamatan Seberang Ulu 2 dengan luas wilayah kumuh 158.349 HA pada tahun 2019 mencatat golput paling banyak mencapai 45,6% dan tahun 2021 persentase golputnya 2,36%.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemilihan umum menjadi sarana kedaulatan rakyat yang telah diatur dalam undang-undang. Namun pada pelaksanaannya masih banyak ditemukan fenomena golput atau tidak memilih terkhusus di wilayah kumuh Kota Palembang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada pemilu DPR 2019 menyatakan bahwa Sumatera Selatan menempati peringkat ke-25 dengan jumlah golput 16,05% dan Kota Palembang menjadi salah satu penyumbang golput dengan persentase mencapai 19,3%. Berdasarkan data golput KPU Kota Palembang dan luas wilayah kumuh dari Surat Keputusan Kota Palembang, kedua hal ini memiliki korelasi, seperti Kecamatan Gandus dengan luas wilayah kumuh 111.808 HA pada tahun 2019 persentase golput mencapai 14,8% dan tahun 2024 persentase golput 2,23%. Kecamatan Kertapati dengan luas wilayah kumuh 418.539 HA pada tahun 2019 persentase golput 0,61% dan tahun 2021 persentase golput tertinggi yaitu 3,35%, kemudian Kecamatan Seberang Ulu 2 dengan luas wilayah kumuh 158.349 HA pada tahun 2019 mencatat golput paling banyak mencapai 45,6% dan tahun 2021 persentase golputnya 2,36%.

Dari uraian diatas terlihat bahwa adanya ketimpangan persepsi pada pemilihan umum masyarakat pada daerah yang kumuh sehingga akan mempengaruhi hasil suara sah pada pemilihan umum di Kota Palembang. Sehingga penelitian ini dilakukan lebih dalam untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat, faktor yang mempengaruhi persepsi mereka, dan bagaimana peran pemerintah akan permasalahan ini.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian sebelumnya sebagai pedoman untuk penelitian yang akan dilakukan. Dengan merujuk beberapa penelitian terdahulu peneliti dapat memperoleh referensi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu juga diperlukan untuk membandingkan hasilnya dengan penelitian yang akan datang sehingga dapat menjadi sumber referensi yang sesuai. Peneliti perlu menjelaskan beberapa aspek dari penelitian sebelumnya agar dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara berbagai penelitian tersebut.

Penelitian pertama jurnal berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Budaya Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Namu Ukur Utara Langkat” dengan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penduduk Desa Namu Ukur Utara melihat praktik politik identitas budaya dalam pemilihan kepala desa. Perbedaan pada penelitian ini pada lokasi penelitian dan fokus penelitian serta objek penelitian tentang budaya politik identitas sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan tentang masyarakat wilayah kumuh. Penelitian ini berfokus pada praktik politik identitas sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan lebih mendalam pelaksanaan pemilu. Persamaannya adalah kedua penelitian ini mengulas persepsi masyarakat pada fenomena pemilu (Rosha dkk., 2023).

Penelitian kedua, jurnal dengan berjudul “Persepsi Politik Pemilih Pemula Menghadapi Pemilu 2024 di Nagari Sabu, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar”. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tanggapan pemilih pemula terhadap pemilu 2024. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian dan subjeknya, penelitian ini menggunakan pemilih pemula sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan objeknya

masyarakat di wilayah kumuh. Persamaannya yaitu fokus pada persepsi dan metode dengan pengumpulan data yang sama (Yendra, 2023).

Penelitian ketiga, jurnal berjudul “Analisis Politik Milenial : Persepsi Siswa SMA terhadap dinamika Politik pada PEMILU 2019 di Indonesia”. Metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan mengenalkan dan meningkatkan kesadaran politik generasi milenial. Perbedaan dengan penelitian ini adalah subjek dan objeknya yaitu penelitian ini meneliti pemilu 2019 dan generasi milenial sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan pelaksanaan pemilu 2024 dan masyarakat wilayah kumuh. Persamaannya pada permasalahan yang berangkat dari data golput dan metode yang sama namun penelitian ini menggunakan *grounded theory*. Hasil penelitian ini isu politik dilakukan dengan diskusi, perdebatan dan akses informasi. Dari isu politik tersebut membentuk persepsi pada individu yang melalui tahapan seleksi, interpretasi dan berakhir pada Pembulatan. Namun persepsi yang terbentuk bukan terpaku pada isu politik yang dibahas tetapi lebih pada sosialisasi yang sudah diterima individu sebelumnya. Oleh karena itu media sosial sebagai sumber informasi utama sekarang ini hanyalah sebagai penegas pada persepsi yang sudah terbentuk atau sebagai pembahasan kontradiksi pada persepsi yang sudah terbentuk (Rohim & Wardana, 2019).

Penelitian keempat, jurnal berjudul “Persepsi Mahasiswa tentang Kondisi Politik Indonesia Menjelang Pemilu 2024”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui persepsi gen Z pada dinamika politik sebelum pemilihan umum. Hasil pembahasan penelitian ini adalah Gen Z tumbuh tidak seperti pendahulu mereka yang senang bicara tentang perdebatan ideologi-ideologi besar dunia, sehingga gen Z punya cara sendiri yang unik, cair dan kreatif dalam memodifikasi banyak hal, termasuk ideologi politik. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi, subjek dan objek penelitian kemudian penelitian ini dilaksanakan menjelang pemilu sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu. Persamaannya pada kajian masalah persepsi politik yang berangkat dari fenomena sosial di kelompok masyarakat tertentu (Sani, 2023).

Penelitian kelima, jurnal berjudul “Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa anggapan publik lingkup desa pada fenomena politik uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Maja memiliki persepsi berbeda dengan norma hukum dalam memandang politik uang. Masyarakat menganggap bahwa politik uang adalah bentuk terimakasih atas suara yang akan diberikan dan pendekatan kepada masyarakat. Dalam teori tindakan sosial, Weber memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* untuk memahami makna tindakan seseorang. Dalam hal ini masyarakat Maja membangun persepsi dan keputusan tindakan didasarkan pada penglihatannya terhadap orang sekitar dan figur yang diteladani. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi wilayah objek yang dipersepsi. Persamaannya pada kajian untuk mengetahui persepsi masyarakat pada fenomena politik (Nabilah dkk., 2022).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengetahui persepsi masyarakat di wilayah kumuh kota Palembang mengenai pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, belum ada penelitian terdahulu membahas persepsi masyarakat wilayah kumuh terhadap pelaksanaan pemilihan umum. Kebanyakan penelitian terdahulu berangkat dari fenomena politik yang lebih spesifik seperti politik uang atau politik identitas. Kemudian karena melihat fakta bahwa jumlah persentasi golput yang tinggi juga ada di wilayah dengan luas(HA) kumuh tertinggi serta untuk mengetahui faktor penyebab terbentuknya persepsi tersebut. Metode yang

digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara semi formal agar pelaksanaan penelitian lebih fleksibel menyesuaikan kondisi yang ada. Kemudian pengukuran berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu menggunakan konsep teori persepsi politik yang berdimensi reaksi, interpretasi, edukasi dan informasi (Yendra, 2023).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat di wilayah kumuh Kota Palembang terhadap pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, kemudian mengetahui faktor penyebab terbentuknya persepsi tersebut serta menganalisis peran pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum dalam perbaikan persepsi masyarakat.

II. METODE

Penelitian ini akan melihat secara komprehensif akan permasalahan persepsi masyarakat daerah kumuh dalam pemilihan umum yang dilaksanakan di Kota Palembang. Oleh karena itu, penelitian akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan mengkaji sampel. Melalui pendekatan penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengumpulkan fakta-fakta yang berada dilapangan melalui pelaksanaan wawancara dan observasi yang dilaksanakan kepada masyarakat Kota Palembang dan beberapa pemangku kepentingan terkait. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan fakta empiris tentang persepsi masyarakat di wilayah kumuh tentang pemilihan umum dan dampaknya terhadap angka golput dengan menggunakan teknik analisis data. Oleh karena itu, data akan melalui metode analisis data kualitatif dengan mengikuti prosedur yang ditemukan dalam model analisis yang mencakup pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 12 orang informan yang terdiri dari kepala wilayah (Camat) Kecamatan Gandus, Seberang Ulu 2 dan Kertapati, Sekretaris KPU Kota Palembang, Panitia Pemilihan Kecamatan Gandus dan Seberang Ulu 2, 3 orang masyarakat dan tokoh masyarakat dari setiap Kecamatan Gandus, Kertapati dan Seberang Ulu 2. Pemilihan informan ditarik melalui dasar penentuan wilayah kumuh Kota Palembang (Surat Keputusan Walikota Nomor 136/4123/BAK dan Keputusan Walikota Palembang Nomor 325/KPTS/DPRKP/2020 tentang pembagian wilayah kumuh). Informan kuncinya adalah masyarakat wilayah kumuh dan tokoh masyarakat dari tiga kecamatan dengan luas (HA) wilayah kumuh terbanyak di Kota Palembang yaitu Kecamatan Gandus, Kertapati dan Seberang Ulu 2 agar lebih merepresentasikan keseluruhan. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 14 hari.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis persepsi masyarakat wilayah kumuh menggunakan konsep teori persepsi politik yang terdiri dari empat dimensi yaitu reaksi, interpretasi, edukasi dan informasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut (Yendra, 2023).

3.1. Persepsi Masyarakat Kumuh terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Palembang

Yendra (2023) persepsi adalah tanggapan yang tergambar melalui tindakan atas bayangan yang tersimpan dalam ingatan setelah pengamatan dan pengalaman. Dalam konteks politik, persepsi melambangkan cara pandang sementara dari masyarakat terhadap dinamika politik yang dihasilkan melalui reaksi, interpretasi, informasi dan edukasi.

Dalam teori persepsi politik, reaksi diartikan aksi yang timbul akibat gejala politik tertentu yang dalam penelitian ini konteksnya reaksi dari masyarakat wilayah kumuh pada pelaksanaan pemilihan umum. Reaksi yang muncul dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan sosial, di mana masyarakat di wilayah kumuh mungkin merespons pemilihan umum dengan kekecewaan atau rasa tidak percaya terhadap sistem demokrasi. Sehingga, Persepsi politik masyarakat di wilayah kumuh dipengaruhi oleh pengalaman sehari-hari yang penuh dengan tantangan, seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan ketidaksetaraan sosial. Masyarakat di kawasan kumuh cenderung memiliki persepsi yang skeptis terhadap dinamika politik, termasuk proses pemilu, karena mereka merasa tidak terwakili atau tidak mendapatkan manfaat langsung dari kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.

Masyarakat wilayah kumuh tidak begitu merasakan manfaat pelaksanaan pemilihan umum dan sikap masyarakat hanya mengikuti program atau pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan uang politik yang diberikan dan kontribusi menjelang pemilihan oleh peserta pemilihan umum. Fenomena *money politic* terbukti dengan memilih hanya memilih peserta pemilu yang memberikan uang paling banyak menurut pernyataan masyarakat serta tokoh masyarakatnya. Pernyataan-pernyataan tersebut sama seperti pendapat dalam buku *Dinamika Politik dan Pemerintah Lokal* bahwa demokrasi menjadi instrumen politik yang belum menghasilkan pemimpin yang mumpuni dan amanah (Labolo, 2015). Kemudian reaksi fisik dan emosional tidak ada karena masyarakat wilayah kumuh tidak mengikuti perkembangan politik serta tidak ada pembeda dalam pelaksanaan pemilihan umum di wilayah kumuh yang artinya pemilu dilaksanakan sama dengan daerah lain. Reaksi masyarakat terhadap pemilu tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan terhadap calon atau partai politik. Masyarakat yang merasa tidak terlibat atau terpinggirkan oleh proses politik mungkin lebih cenderung untuk bereaksi negatif atau mengabaikan kesempatan untuk memilih. Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian sufiansyah yang menjelaskan ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon kepala wilayah karena tidak membawa perubahan namun mereka tetap mengikuti pemilihan karena tetap mengharapkan perbaikan lingkungan di masa yang akan datang.

Kemudian Interpretasi diartikan sebagai proses penafsiran dari individu atau kelompok terhadap suatu objek, dalam konteks politik dapat dimaknai interpretasi orang atau masyarakat terhadap aktivitas politik berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Interpretasi diartikan sebagai proses penafsiran dari individu atau kelompok terhadap suatu objek, dalam konteks politik dapat dimaknai interpretasi orang atau masyarakat terhadap aktivitas politik berdasarkan pengetahuan dan pengalaman.

Mayoritas masyarakat wilayah kumuh menilai kontribusi pelaksanaan pemilihan umum hanya sebatas keuntungan sesaat yang didapatkan menjelang pemilihan, bukan kinerja lima tahun mendatang untuk kehidupan mereka kedepannya. Oleh karena itu, diharapkan kedepannya pemerintah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk pendidikan sehingga menciptakan pola pikir yang benar dalam menilai pelaksanaan pemilihan umum. Begitupun peserta pemilu yang mengikuti proses demokrasi ini pelaksanaannya masih sebatas demokrasi prosedural, belum mencapai inti dari demokrasi itu sendiri (*substantive democracy*). Secara normatif-administratif memang disebutkan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi kepala daerah. Namun, pada praktiknya calon yang berpeluang besar untuk terpilih sebagai kepala daerah adalah orang yang mempunyai modal finansial yang besar sehingga sanggup untuk memutar peredaran uang dalam skala besar agar dapat keluar sebagai pemenang (Labolo & Ilham, 2015).

Kemudian untuk mengetahui interpretasi prediktif pemahaman masyarakat wilayah kumuh terhadap pelaksanaan pemilihan umum masih sangat jauh, mereka hanya mengharapkan keuntungan sesaat dan bantuan. Manfaat ini harusnya bisa dirasakan masyarakat dari program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat wilayah kumuh melalui dinas terkait yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman. Oleh karena itu peneliti melakukan juga wawancara kepada pihak pemerintah sebagai indikator atribusi atau pernyataan untuk menjelaskan suatu peristiwa, dalam hal ini peningkatan kualitas hidup guna perbaikan persepsi politik di masyarakat wilayah kumuh Kota Palembang

Dimensi Informasi menjadi faktor penting yang memengaruhi bagaimana masyarakat memandang, memahami, dan akhirnya berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Informasi merupakan elemen vital yang membentuk pandangan, sikap, dan respon individu atau kelompok terhadap fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses demokrasi seperti pemilihan umum. Menurut Huda dkk., (2023) Kelemahan yang umum terjadi adalah ketika pengiriman data dilakukan secara serentak dalam satu waktu, maka kemungkinan terjadi kendala pada lalu lintas data karena ukuran server yang tidak memadai; kedua, jaringan internet belum merata di seluruh Indonesia; dan ketiga, belum semua SDM penyelenggara pemilu di tingkat bawah mampu mengoperasikan sistem digital dengan baik. Dimensi informasi dalam konteks ini mencakup berbagai sumber yang tersedia, saluran, dan jenis informasi faktual dan terbaru yang diterima oleh masyarakat di wilayah kumuh.

Masyarakat di wilayah kumuh seringkali menghadapi keterbatasan akses informasi yang dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap pemilihan umum. Berbagai faktor, seperti pendidikan, infrastruktur, dan sosial ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan dan minim literasi informasi dapat menyebabkan masyarakat kurang memahami pentingnya partisipasi dalam pemilu, serta konsekuensi dari pilihan yang mereka buat. Minimnya akses terhadap media massa seperti media sosial dan website resmi organisasi pemerintah, juga berpotensi membuat masyarakat terisolasi dari informasi terkini mengenai pelaksanaan pemilihan umum, calon, program, dan mekanisme pemilihan.

Masyarakat belum mendapatkan akses promosi yang dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara melalui media sosial (Instagram KPU Kota Palembang) atau website resmi KPU Kota Palembang (<https://kota-palembang.kpu.go.id/>). Untuk desiminasi kabar dan isu faktual, masyarakat wilayah kumuh kebanyakan mendapatkan informasi melalui kampanye secara langsung yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Yang terakhir, dimensi edukasi dalam teori persepsi berkaitan dengan bagaimana proses pembelajaran mempengaruhi cara individu dan kelompok memaknai fenomena sosial politik di sekitar mereka. Terdapat tiga indikator utama yang membentuk dimensi edukasi persepsi yaitu transmisi pengetahuan, pengembangan berpikir dan pembentukan kesadaran sosial politik. Transmisi pengetahuan merujuk pada proses penerimaan dan pengolahan informasi tentang Pemilu oleh masyarakat kumuh. Mardjono (2003) masyarakat yang menempati wilayah kumuh tidak memiliki kesadaran politik untuk mengikuti aktivitas politik yang artinya edukasi politik terkhusus pemilihan umum juga masih rendah.

Pemahaman masyarakat wilayah kumuh Kota Palembang terhadap pentingnya pelaksanaan umum masih sangat kurang. Kemudian Indikator pengembangan berpikir berkaitan dengan proses kognitif yang terjadi setelah informasi diterima. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman politik masa lalu, dan exposure terhadap informasi politik. Masyarakat wilayah kumuh Kota Palembang tidak merasakan adanya kemajuan baik dari kualitas hidup ataupun infrastruktur tetapi lingkungan masyarakat wilayah kumuh yang berasal dari imigran lebih cepat berkembang.

Kemudian pembentukan kesadaran sosial politik dalam teori persepsi, berkaitan dengan bagaimana pemrosesan informasi dan pengembangan kognitif membentuk kesadaran politik masyarakat kumuh. Dalam konteks masyarakat kumuh Palembang, pembentukan kesadaran sosial politik ini dipengaruhi oleh bagaimana mereka mempersepsikan berbagai aspek Pemilu berdasarkan pengalaman langsung dan tidak langsung, contohnya peran dari pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam mensosialisasikan pemilihan umum.

3.2. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pemilih di Daerah Kumuh terhadap Pemilihan Umum

Yang pertama adalah faktor ekonomi menjadi pengaruh dominan dalam membentuk persepsi pemilih di daerah kumuh. Masyarakat wilayah kumuh cenderung melihat pemilu sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan material jangka pendek. Diartikan bahwa saat masyarakat tidak mendapat keuntungan, besar kemungkinan mereka tidak mepedulikan pelaksanaan pemilihan umum.

Kemudian perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh calon legislatif menjelang pemilu menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi pemilih. Data penelitian menunjukkan beberapa perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh calon legislatif 2024 di Kecamatan Gandus, seperti perbaikan jalan yang patah, perbaikan jalan rawan banjir, dan pelebaran jalan. Namun, masyarakat menyadari bahwa perbaikan ini bersifat temporer dan hanya dilakukan menjelang pemilihan.

Kedua, Faktor Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Politik Rendahnya tingkat pendidikan di wilayah kumuh berkontribusi terhadap kurangnya pemahaman dan kesadaran politik. Dapat dilihat dari masyarakat yang mengampuh pendidikan sekolah atas berikut

Tabel 1.

Data masyarakat pengampu pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) perkecamatan Kota Palembang

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Luas Wilayah Kumuh (km ²)	Murid SMA (Negeri dan Swasta)
1.	Ilir Barat II	6,22	0,5429	1.082
2.	Gandus	68,78	1,11808	1.948
3.	Sebrang Ulu I	8,28	0,8968	4.294
4.	Jakabaring	9,16	0,94647	-
5.	Kertapati	42,56	4,18539	2.609
6.	Sebrang Ulu II	10,69	1,58349	2.435
7.	Plaju	15,17	0,92898	2.077
8.	Ilir Barat I	19,77	-	8.357
9.	Bukit kecil	9,92	0,1819	529
10.	Ilir Timur I	6,50	0,0637	3.646
11.	Kemuning	9,00	-	5.741
12.	Ilir Timur II	10,82	0,35564	8.292
13.	Ilir Timur III	14,76	0,06862	-
14.	Kalidoni	27,92	0,04475	2.971
15.	Sako	18,04	-	2.208
16.	Sematang Borang	36,98	-	-
17.	Sukarami	51,46	-	4.628
18.	Alang-Alang Lebar	34,58	-	2.124
Total		400,61	10,92309	52.942

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang, 2021

Jumlah masyarakat yang menyelesaikan pendidikan hingga SMA di kecamatan dengan wilayah kumuh tertinggi menunjukkan angka yang rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Melalui data ini masih cukup subjektif karena penerimaan sekolah negeri tahun 2022 belum menggunakan sistem zonasi sehingga mencerminkan harapan yang minim untuk melanjutkan pendidikan di lingkungan tersebut.

Kurangnya kesadaran politik di masyarakat menyebabkan mereka tidak memahami pentingnya pemilu dan fungsi pemerintahan. Menurut pak Nasif Setiawan dan Pak Yusuf Srot bahwa masyarakat melihat pemilu hanya sebagai kontestasi tanpa menyadari urgensinya. Pengalaman negatif dimasa lalu telah menimbulkan skeptisme dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik dengan pemilu dianggap sebagai rutinitas lima tahunan yang tidak membawa perubahan signifikan. Meskipun partisipasi tetap ada terutama karena insentif jangka pendek, namun harapan untuk transformasi kehidupan melalui proses demokrasi tetap rendah.

Ketiga, Faktor Akses Informasi dan Sosialisasi Keterbatasan akses terhadap informasi politik dan kurang efektifnya sosialisasi pemilu menjadi faktor penting yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti promosi di website resmi KPU Kota Palembang, Media sosial (Instagram) KPU Kota Palembang, dan sosialisasi pemilihan di tempat perbelanjaan dan ajakan melalui media cetak sampai menyewa influencer. Tetapi kebanyakan promosi dan sosialisasi dilakukan lewat internet. Namun, tidak dipungkiri bahwa memang terdapat beberapa wilayah yang terjangkau dengan baik seperti yang diungkapkan oleh sekretaris KPU Kota Palembang. Kesenjangan informasi ini berkontribusi pada kurangnya pemahaman komprehensif tentang sistem pemilu, kandidat, dan platform politik mereka.

Keempat, Faktor Mobilisasi Politik Mobilisasi politik oleh elit dan tokoh masyarakat setempat juga berperan dalam membentuk persepsi masyarakat. pemilihan umum hanyalah salah satu indikator partisipasi politik dan di kebanyakan negara berkembang pemilihan umum biasanya sudah direayasa sedemikian rupa, sehingga seringkali muncul suatu istilah yang kontradiktif, yaitu “pemilihan umum” dengan “target”. Bahwa suatu hasil pemilihan umum dapat ditargetkan sesungguhnya merupakan suatu kegagalan besar. Apabila ternyata bahwa persentase suara yang diperoleh oleh masing-masing kekuatan peserta pemilihan umum persis seperti yang ditargetkan, maka sangat wajar jika timbul kesan bahwa pemilihan umum tersebut sesungguhnya hanya merupakan political farce atau “dagelan politik” yang canggung (Rowa, 2015). Partisipasi politik di wilayah kumuh sering kali merupakan hasil dari mobilisasi daripada kesadaran dan inisiatif pribadi. Penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 yang merupakan perintah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang Pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalisir pembiayaan negara dalam penyelenggaraan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan mengefisienkan skema kerja pemerintah (Rajagukguk dkk., 2021). Namun sepertinya upaya tersebut belum mendapatkan hasil yang sesuai harapan sehingga pelaksanaan pemilu masih identic dengan adanya mahar politik.

Faktor-faktor di atas berinteraksi secara kompleks dalam membentuk persepsi politik masyarakat wilayah kumuh terhadap pemilihan umum. Sebagai data sekunder, peneliti tidak bisa menampilkan karena bersifat rahasia dan pribadi setiap masyarakat penerima uang oleh peserta pemilu. Persepsi ini kemudian berpengaruh terhadap pola partisipasi politik mereka, yang cenderung pragmatis dan transaksional, dengan fokus pada manfaat jangka pendek daripada pertimbangan platform politik jangka panjang atau ideologi.

3.3. Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait dalam Memperbaiki Persepsi Pemilih di Wilayah Kumuh

Pemerintah dan lembaga terkait (KPU) memiliki peran strategis dalam upaya memperbaiki persepsi pemilih di wilayah kumuh Kota Palembang. Berdasarkan temuan penelitian, persepsi masyarakat di wilayah kumuh terhadap pemilihan umum masih cenderung pragmatis dan transaksional. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengubah persepsi tersebut menjadi lebih substantif dan berorientasi pada nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya.

KPU Kota Palembang sebagai penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab utama dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Selain pelaksanaan sosialisasi, KPU juga mengevaluasi kinerjanya. KPU Kota Palembang juga menyatakan bahwa masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau dengan baik, terutama di wilayah kumuh. Kami akan terus meningkatkan upaya sosialisasi dan menyediakan akses informasi yang lebih baik untuk masyarakat di wilayah kumuh. KPU Kota Palembang perlu mengembangkan strategi sosialisasi yang lebih adaptif dengan karakteristik masyarakat wilayah kumuh. Ini termasuk mengoptimalkan komunikasi langsung melalui tokoh masyarakat setempat, menggunakan bahasa dan media yang mudah dipahami, serta memperkuat metode jemput bola untuk menjangkau pemilih yang sulit diakses melalui media konvensional atau digital. Kesenjangan informasi ini berkontribusi pada kurangnya pemahaman komprehensif tentang sistem pemilu, kandidat, dan platform politik mereka

Kemudian, pemerintah Kota Palembang melalui kecamatan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran politik masyarakat wilayah kumuh. Berdasarkan wawancara dengan Camat Kertapati kecamatan telah melakukan sosialisasi pemilihan umum melalui berbagai cara yaitu dengan pertemuan langsung dengan tokoh masyarakat atau tokoh adat atau yang dituakan pada lingkungan masyarakat tertentu. Pertemuan-pertemuan rutin seperti ini dilaksanakan setiap hari Sabtu melalui program kerja bakti oleh kelurahan dan Kecamatan serta musrenbang setiap Bulan Januari.

Upaya yang sama dilaksanakan di Kecamatan Gandus dan Kecamatan Kertapati sama seperti dengan KPU Kota Palembang, mereka menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita dan informasi mengenai pelaksanaan pemilu. Namun, upaya ini perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah kecamatan perlu lebih aktif dalam memfasilitasi dialog antara masyarakat wilayah kumuh dengan peserta pemilu, sehingga terbentuk komunikasi politik yang lebih substantif dan tidak hanya bersifat transaksional menjelang pemilu.

Disperkimtan Kota Palembang memiliki peran tidak langsung namun signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat wilayah kumuh terhadap pemilu melalui program peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Berbagai program kesejahteraan terkhusus di beberapa titik wilayah kumuh telah dilaksanakan seperti contohnya program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk wilayah kumuh sebagai aduan sarpras dan pemberdayaan baik SDM dan SDA dan Program Keluarga Harapan (PKH)".

Melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, persepsi masyarakat wilayah kumuh terhadap pemilihan umum diharapkan dapat bergeser dari yang semula pragmatis dan transaksional, menjadi lebih substantif dan berorientasi pada nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi secara keseluruhan di Kota Palembang.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian mengenai persepsi politik masyarakat telah banyak dilakukan sebelumnya, dengan berbagai macam fokus dan metode serta indikator teori yang berbeda. Penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan perspektif spesifik mengenai konteks persepsi politik masyarakat di wilayah

kumuh Kota Palembang terhadap pelaksanaan pemilihan umum dengan analisis menggunakan konsep teori persepsi politik (Yendra, 2023).

Tidak sama seperti penelitian sebelumnya, bahwa persepsi masyarakat ternyata masih mengarah kepada kurangnya kesadaran akan urgensi demokrasi yaitu pemilihan umum dikarenakan berbagai faktor seperti kelompok etnis (Rosha dkk., 2023), sedangkan penelitian yang dilaksanakan membuktikan bahwa masyarakat di wilayah kumuh memilih berdasarkan siapa yang memberikan apa. Hasil penelitian yang dilaksanakan juga memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa usia pemilih pemula belum memahami dinamika politik dan bersikap apatis terhadap pelaksanaan pemilihan umum (Yendra, 2023). Kemudian, hasil penelitian ini juga mempertegas bahwa pelaksanaan pemilu belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan dan sebatas pelaksanaan demokrasi prosedural.

Namun, penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berbeda dengan penelitian (Rohim & Wardana, 2019) yang berfokus pada persepsi siswa SMA. Penelitian ini mengambil subjek yang lebih luas yaitu masyarakat wilayah kumuh Kota Palembang yang telah dipilih melalui seleksi melalui Surat Keputusan Walikota tentang penetapan Wilayah Kumuh Kota Palembang. Berbeda pula dengan penelitian (Sani, 2023) yang menggunakan teori persepsi Deddy Mulyana sebagai tolak ukur persepsi dan membahas persepsi mahasiswa dengan hasil bahwa generasi Z masih melihat dan membaca aktivitas politik melalui internet namun tidak mendalami lebih lanjut karena belum adanya kepedulian, sedangkan penelitian ini menggunakan konsep teori persepsi politik yang lebih spesifik berisikan tentang dimensi pembentukan persepsi dalam konteks politik (Yendra, 2023), dengan hasil masyarakat lebih digiring oleh pihak tertentu untuk kemudian terlibat dalam proses politik atau pemilihan umum.

Meskipun penelitian (Nabilah dkk., 2022) juga mendalami persepsi masyarakat terhadap fenomena politik (politik uang) dengan metode kualitatif dan wawancara yang menyimpulkan bahwa politik uang merupakan bentuk terimakasih kepada masyarakat atas suara yang telah diberikan sedangkan penelitian ini menyimpulkan salah satunya politik uang sebagai keharusan masyarakat di wilayah kumuh Kota Palembang untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Penelitian ini tidak mengambil fenomena yang sempit seperti politik uang atau identitas. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian (Rosha dkk., 2023) yang merupakan studi eksploratif menggunakan teori identifikasi primordialitas guna mengetahui interpretasi tentang peserta pemilu yang bukan merupakan masyarakat asli setempat dan terbukti masih banyak masyarakat yang memilih berdasarkan latar belakang bukan kualitas, penelitian yang dilaksanakan membuktikan masyarakat wilayah kumuh memilih berdasarkan peserta pemilu yang paling banyak memberikan kontribusi.

Secara spesifik, temuan penelitian ini menyoroti kondisi masyarakat wilayah kumuh di Kota Palembang dan hasil dari pemilihan umum yang sudah dilaksanakan yang kemudian dilihat adanya keterhubungan antara kedua masalah tersebut sehingga didalami persepsi masyarakat wilayah kumuh tersebut guna mengetahui faktor penyebab pembentukan persepsi politik masyarakat. Menggunakan analisis konsep teori persepsi politik (Yendra, 2023). Tidak hanya mengidentifikasi permasalahan, peneliti juga mendalami peran pemerintah serta pelaksana pemilu guna perbaikan persepsi masyarakat agar kedepannya proses demokrasi berjalan sesuai harapan dari konstitusi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi masyarakat wilayah kumuh terhadap pelaksanaan pemilihan umum di Kota Palembang, kesimpulan yang didapatkan secara keseluruhan adalah persepsi masyarakat wilayah kumuh Kota Palembang terhadap pemilihan umum masih belum mencerminkan kesadaran demokratis yang ideal. Pemilu lebih dipandang sebagai rutinitas lima

tahunan yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup mereka. Masyarakat cenderung bersikap skeptis terhadap janji-janji politik karena berdasarkan pengalaman, realisasi program pasca-pemilu sangat minim dirasakan di wilayah mereka. Penarikan Kesimpulan tersebut melalui teori Persepsi Politik Yendra dengan empat dimensi yaitu : Dimensi reaksi, mayoritas masyarakat wilayah kumuh Kota Palembang menunjukkan reaksi yang cenderung pragmatis terhadap pemilihan umum ; Dimensi interpretasi, masyarakat wilayah kumuh memaknai pemilihan umum sebagai momentum untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek, bukan sebagai proses demokrasi yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan jangka panjang ; Dimensi edukasi, ditemukan bahwa tingkat pemahaman politik masyarakat wilayah kumuh masih rendah ; Dimensi informasi, masyarakat wilayah kumuh mendapatkan informasi tentang pemilu terbatas dari televisi, percakapan antar tetangga, dan kampanye langsung. Akses terhadap media digital dan platform resmi pemerintah sangat minim.

Beberapa faktor utama yang memengaruhi persepsi pemilih di wilayah kumuh antara lain : Ekonomi dan material, masyarakat kumuh merupakan mayoritas penduduk dengan tingkat ekonomi kebawah atau sulit jadi persepsi terbentuk karena kebiasaan dengan fenomena “*money politic*” dan kontribusi sesaat oleh peserta pemilu ; Pendidikan dan Kesadaran Politik, karena pendidikan masyarakat yang kurang memadai terbentuklah pola pikir akan rendahnya kesadaran berpolitik dan bernegara, kondisi ini membuat partisipasi menjadi rendah ; Akses Informasi dan Sosialisasi, kurangnya sosialisasi yang efektif dan minimnya akses media sosial oleh masyarakat membuat aktivitas politik khususnya pemilihan umum kurang tersebarluaskan di lingkungan wilayah kumuh Kota Palembang ; Mobilisasi Politik, dari faktor-faktor sebelumnya, mobilisasi mudah dilakukan di wilayah kumuh oleh peserta pemilu.

Pemerintah dan lembaga terkait seperti KPU telah berupaya melakukan sosialisasi pemilihan umum dengan berbagai cara : Komisi Pemilihan Umum, upaya langsung (membuat stand pemilu dan media cetak) dan tidak langsung (sosial media dan website resmi) ; Kecamatan, melakukan usaha dengan komunikasi dan koordinasi langsung dengan masyarakat serta memanfaatkan Panitia Pemilihan Kecamatan agar lebih luas dalam mensosialisasikan pemilu ; Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan, melaksanakan kesejahteraan bagi masyarakat wilayah kumuh agar tercipta masyarakat dengan kualitas yang lebih unggul kedepannya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan informan yang sulit ditemui. Penelitian dilaksanakan dalam waktu empatbelas hari untuk berkomunikasi dengan duabelas informan. Informan yang dipilih juga sangat selektif karena tidak semua wilayah kumuh di Kota Palembang aman untuk dikunjungi mengingat tingkat kriminalitas tinggi di wilayah kumuh

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menemukan beberapa temuan seperti fenomena politik yang lebih spesifik di daerah kumuh Kota Palembang. Oleh karena itu disarankan untuk adanya penelitian seterusnya di lokasi yang sama berkaitan dengan fenomena politik yang lebih spesifik seperti *money politics* dan politik identitas. Kemudian peneliti menyarankan untuk dilakukan juga penelitian yang berkaitan dengan tingkat kemajuan dan kepuasan masyarakat terhadap program kesejahteraan di wilayah kumuh untuk perimeter kebijakan selanjutnya bagi pemerintah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh informan yang membantu selama proses penelitian berlangsung, sehingga bisa sampai tahap ini. Peneliti juga sangat mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan moril selama penelitian berlangsung sehingga motivasi dan semangat tidak peneliti tidak pernah hilang. Terlebih kepada

dosen pembimbing Ibu Prof. Dr. Rossy Lambelanova, AP, SIP, M.Si yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti hingga berhasil sampai ke titik ini dan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang telah mendukung penuh pelaksanaan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Anon. (2016). *10 Provinsi Paling Kumuh di Indonesia*. databoks. <https://databoks.katadata.co.id/-/statistik/f96b0562f99d2e8/10-provinsi-paling-kumuh-di-indonesia>
- Hudhaibi, H, A. (2023). General Election (Election) As an Implementation of The Constitution in A Country with A Democracy System. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 859–866. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2682>
- Huda, D., Winarto, A. E., & Lestariningsih. (2023). Analysis of 2024 General Election Digitalization System as An Effort to Improve The Quality of Democracy in Indonesia. *Journal Of Development Research*, 7(2), 272–282. <https://doi.org/https://doi.org/10.28926/jdr.v7i2.313>
- Kajumulo T, A. (2003). *Slums of the Worlds: The face of urban poverty in the new millenium?* UN-HABITAT.
- Labolo, M. (2015). *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal*. Ghalia Indonesia.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mardjono, H. (2003). *Politik Indonesia*. Gema Insani Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. UI-Press.
- Nabilah, R., Afrizal, S., & Bahrudin, F. A. (2022). Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Publisitas*, 8(2), 84–96. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i2.132>
- Rajagukguk, K. J., Aripin, S., & Wahyudi, H. (2021). Simultaneous General Election: It Is Fair for Democracy in Indonesia. *JURNAL ILMU PEMERINTAHAN:Kajian IlmuPemerintahan dan Politik Daerah*, 6(1), 56–64. <https://doi.org/10.24905/jip.6.1.2021.56-64>
- Rohim, M., & Wardana, A. (2019). Analisis Politik Milenial : Persepsi Siswa SMA Terhadap Dinamika Politik Pada PEMILU 2019 di Indonesia. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 4, 47–63. <https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.47-63>
- Rosha, M. A., Muham, A. P., Damanik, P. Y., & Ivana, J. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Budaya Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala DesaDiDesa Namu

Ukur UtaraLangkat. *Journal Of Law*, 2(1), 31–37.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51178/mjol.v2i1.1329>

Rowa, H. (2015). *DEMOKRASI DAN KEBANGSAAN INDONESIA*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Sani, A. (2023). PERSEPSI MAHASISWA TENTANG KONDISI POLITIK INDONESIA MENJELANG PEMILU 2024. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 1–12.
<https://doi.org/http://jurnal.desantapublisher.com/index.php/kalodran/article/view/191>

STATISTIK, B. P., & PALEMBANG, K. (2021). *Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palembang, 2020*. BADAN PUSAT STATISTIK.
<https://palembangkota.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3lTbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMyMxNjcx/jumlah-penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-palembang.html?year=2020>

Yendra, M. (2023). Persepsi Politik Pemilih Pemula Menghadapi Pemilu 2024 di Nagari Sabu, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. *UNES Law Review*, 6(1), 4011–4018.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1232>

